BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu negara yang memakai sistem demokrasi. Dalam rangka untuk mewujudkan sistem demokrasi yang baik, maka negara Indonesia memakai sistem Pemilihan Umum (Pemilu). Dimana pemilu di lakukan 5 Tahun sekali guna mendapatkan pemimpin yang baik dan sesuai dengan apa yang di harapkan masyarakat karena pemilu memakai sistem pemungutan suara.

Secara etimologi Demokrasi berasal dari bahasa Yunani Kuno yaitu kata "Demos" yang berarti rakyat dan "cratos" yang berarti kekuasaan yang mutlak. Apabila digabung, maka secara harfiah demokrasi adalah kekuasaan yang mutlak di tangan rakyat. Demokrasi juga berarti pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (democracy is government of the people, by the people, and for the people), maka hal ini mengandung makna bahwa kekuasaan negara tersebut berada di tangan rakyat dan segala tindakan negara ditentukan oleh rakyat. Untuk mewujudkan pengertian tersebut maka pemilu dipercaya sebagai suatu cara untuk mengangkat eksistensi rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam negara.

Samuel P. Huntington menyatakan bahwa sebuah sistem politik sudah dapat dikatakan demokratis bila para pembuat keputusan kolektif yang paling kuat dalam sistem itu dipilih melalui pemilihan umum yang adil, jujur, dan berkala, dan

¹ Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Lmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008).

² Abraham Loncoln, A.A. Said Gatara, and Moh. Dzulkiah Said, *Sosiologi Politik: Konsep Dan Dinamika Perkembangan Kajian* (Bandung: Pustaka Setia, 2007). hlm. 190.

di dalam sistem itu para calon bebas bersaing untuk memperoleh suara dan hampir semua penduduk dewasa berhak memberikan suara.³

Lembaga legislatif adalah lembaga legislator atau membuat undang-undang. Anggota-anggotanya dianggap mewakili rakyat. Oleh karena itu, lembaga ini sering dinamakan Dewan Perwakilan Rakyat, atau yang dikenal sebagai Parlemen. Parlemen/DPR dianggap merumuskan kemauan rakyat/umum yang mengikat seluruh masyarakat. Secara umum Legislatif mempunyai tugas dan fungsi, dimana Legislatif membuat undang-undang yang berlaku di indonesia. Namun lembaga ini tidak mempunyai kewenangan untuk mengeksekusi sebuah undang-undang.Hal ini berbeda dengan lembaga eksekutif yang tidak hanya mampu bertindak sebagai "eksekutor" namun juga bisa bertindak sebagai "legislator".⁴

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, lembaga legislatif (DPR) juga mempunyai beberapa hak. Hak-hak tersebut antara lain: (a) hak amandemen, yaitu hak anggota legislatif untuk mengajukan usul (menerima, menolak sebagian, dan menolak seluruhnya) Rancangan Undang-Undang (RUU) yang diajukan eksekutif; (b) hak inisiatif, yaitu hak anggota legislatif untuk berinisiatif mengajukan Rancangan Undang-Undang; (c) hak interpelasi, yaitu hak untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijaksanaannya di suatu bidang; (d) hak budgeting, yaitu hak untuk membuat dan menetapkan anggaran bersama eksekutif; (e) hak angket, yaitu hak untuk melakukan penyelidikan terhadap suatu kebijakan tertentu; dan (f) hak menyatakan pendapat, yaitu hak

³ Samuel P.Huntington, *Gelombang Demokratisasi Ketiga*, (Jakarta: Grafiti, 1997). hlm. 5-6.

⁴ Website Fakultas Hukum UMSU, 'Pengertian Tujuan Dan Tugas Lembaga Legislatif', https://fahum.umsu.ac.id/pengertian-tujuan-dan-tugas- lembaga-legislatif/. Diakses tanggal 17 Juni 2024, pukul 17:02 WIB.

untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan pemerintah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya.⁵

Pada tanggal 14 Februari 2024 Indonesia melaksanakan Pemilihan Umum (Serentak) untuk memilih Presiden dan wakil Presiden, anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota,dan DPD RI.⁶ Dalam pemilu 2024 ini ada fenomena baru dalam perjalanan politik Indonesia yaitu munculnya banyak mantan kepala daerah yang mencalonkan diri sebagai calon legislatif. Di Provinsi Jambi sendiri terdapat 10 mantan Kepala daerah yang mencalonkan diri menjadi anggota legislatif DPR RI di Provinsi Jambi Tahun 2024 dan berasal dari partai politik yang berbeda-beda.

Pemilihan Umum merupakan salah satu sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang berdasarkan pada demokrasi perwakilan. Rakyat tidak dilibatkan langsung dalam proses pengambilan keputusan akan tetapi diwakilkan kepada wakil yang telah mereka pilih melalui suatu ajang pemilihan. Pemilu dilakukan 5 Tahun sekali guna mendapatkan pemimpin yang sesuai dengan yang di harapkan masyarakat oleh karena itu pemilu di lakukan dengan sistem pemungutan suara dan apabila calon yang mendapatkan suara terbanyak akan berhasil menduduki jabatan yang di calonkan.

Salah satu bentuk pemilihan umum yang dilakukan di Negara Indonesia adalah pemilihan umum secara serentak, dan merupakan sebuah proses demokrasi untuk memilih seorang pemimpin serta calon-calon legislatif pada periode tertentu.

https://www.go.id./page/read/1136/kilas-pemilu-tahun-2024, Diakses tanggal 10 Juni 2024, pukul

23:41 WIB.

⁵ Website Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 'Hak Dewan Perwakilan Rakyat', https://www.dpr.go.id/tentang/hak-dpr, Diakses tanggal 10 Juni 2024, pukul 23:41 WIB. ⁶ Website Kilas Pemilu Tahun 2024, 'Kilas Pemilu Tahun

Melalui pemilihan umum yang dilaksanakan secara demokratis, maka diharapkan pergantian pemerintahan juga dapat dilaksanakan secara tertib dan damai. Selain itu dengan dilaksanakannya pemilihan umum ruang politik publik terbuka lebih luas lagi. Sulastomo mengemukakan bahwa dengan pemilihan umum, sebuah negara diyakini dapat membangun bangsa sesuai dengan aspirasi rakyatnya secara berkelanjutan, tertib dan aman.⁷

Di Provinsi Jambi indikator keberhasilan Pemimpin Daerah yang berhasil bukan dilihat dari penghargaan yang diperoleh, melainkan Pemimpin yang berprestasi itu adalah pemimpin yang mendapat pengakuan (legitimate) dari masyarakat. Dan pengakuan kualitas juga penting, dimana pemimpin yang mampu memenuhi apa yang dibutuhkan Masyarakat Jambi. Hal yang paling utama dibutuhkan masyarakat jambi adalah hilirisasi dan Kreatifitas Interpreneurship birokrasi dalam rangka meningkatkan out comes/Devisa (Pendapatan Asli Daerah).⁸

Masyarakat Jambi memiliki harapan besar terhadap pemimpin yang terpilih, baik petahana maupun kandidiat baru. Dengan menghadirkan berbagai programprogram kebutuhan masyarakat luas. Selain itu, pemimpin juga diharapkan aktif melakukan lobi ke pemerintah pusat untuk mendapatkan dukungan dan Komunikasi secara langsung dengan masyarakat guna mewujudkannya.

Tercatat dalam pemilu Tahun 2024 sebanyak 44 Mantan kepala daerah di Indonesia, dimana terdiri dari 23 kepala daerah dan 21 wakil kepala daerah yang

.

⁷ Sulastomo, *Demokrasi Atau Democrazy*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001). hlm. 5.

⁸ Berjambi, 'Jambi Mencari Pemimpin Yang Berprestasi 6 Juni 2023', Diambil dari https://berjambi.com/2023/06/06/jambi-mencari-pemimpin-yang-berprestasi/, Diakses tanggal 13 June 2024.

⁹ Ibid.

turut memperebutkan kursi di legislatif khususnya di DPR RI. Keputusan para kepala daerah dan wakil kepala daerah yang mengundurkan dari jabatannya untuk maju sabagai calon anggota legislatif dalam kontetasi pemilihan legislatif (Pileg) 2024 banyak menuai kritik dari masyarakat. Para kepala daerah tersebut diminta untuk tidak memainkan mandat rakyat jika terpilih menjadi anggota parlemen.¹⁰

Partai politik berperan penting tidak hanya merekrut kader partai politik atau pendidikan politik, namun juga berperan "mengarahkan" caleg untuk mengikuti alur partai politik. Meski dari awal caleg memiliki independensi dan kemauan sendiri, bukan tidak mungkin akan mengikuti arahan partai politik baik dalam segi yang baik maupun sebaliknya.¹¹

Dalam kedudukannya sebagai pilar demokrasi, peran partai politik dalam sistem perpolitikan nasional adalah wadah seleksi kepemimpinan nasional dan daerah. Serangkaian penyelenggaraan seleksi kepemimpinan nasional dan daerah melalui pemilu membuktikan keberhasilan partai politik sebagai pilar demokrasi. 12

Kehadiran partai politik salah satunya adalah menjadikan politik untuk menghasilkan para pemimpin yang layak dipilih publik dan menjabat jabatan publik dengan kompetensi dan integritas.¹³ Partai politik pada pemilu 2024 resmi mendaftarkan Bakal Calon Anggota Legislatif (Bacaleg) ke KPU dengan berbagai latar belakang, dan terdapat deretan kepada dan wakil kepala daerah.

13 Ibid.

Metrotv News.com, 'Kepala Daerah Mundur Karena Nyaleg Peneliti Birin Jangan Mainkan Mandat Rakyat', diambil dari https://www.metrotvnews.com.read/NQAC2w8E-44-kepala-daerah-mundur-karena-nyaleg-peneliti-birin-jangan-mainkan-mandat-rakyat, Diakses tanggal 16 Mei 2024, pukul 10:55 WIB.

¹¹ Hukum Online, 'Melihat Pengaruh Parpol Terhadap Kualitas Caleg', Diambil dari Hukumonline.Com/ berita/a/ melihat- pengaruh-parpol-terhadap- kualitas- caleg 1t6581Ee84863e/, Diakses tanggal 27 Mei 2024.

¹² Ibid.

Berdasarkan pasal 182 huruf K dan Pasal 240 ayat (1) huruf k UU Pemilu, mereka harus mundur dari jabatan mereka. Di Provinsi Jambi sendiri pada pemilihan umum (Pemilu) Tahun 2024 mendatang tersedia delapan kursi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan ada sebanyak 10 mantan kepala daerah yang turut mencalonkan diri menjadi calon anggota legislatif.

Berikut Nama-nama mantan Kepala Daerah yang maju menjadi anggota legislatif di Provinsi Jambi 2024:

Tabel 1.1 Daftar Nama-Nama Mantan Kepala Daerah Menjadi Calon Legislatif DPR RI 2024

No.	Nama Caleg	Partai	Masa Jabatan
1.	Cek Endra	Golkar	Bupati Sarolangun 2010-2022
2.	Safrial	PDI-P	Bupati Tanjung Jabung barat 2016-2021
3.	Hasan Basri Agus	Golkar	Gubernur Jambi 2010-2015
4.	M. Syarif Fasha	Nasdem	Wali kota Jambi 2018-2023
5.	Asafri Jaya Bakri	Golkar	Walikota Sungai Penuh 2016- 2021
6.	Ami Taher	PKS	Wakil Bupati Kerinci 2019- 2024
7.	Adirozal	PAN	Bupati Kerinci 2019-2024
8.	Zulfikar Achmad	Demokrat	Bupati Bungo 2006-2011
9.	Mashuri	Demokrat	Bupati Merangin 2021-2023
10.	Masnah Busroh	PAN	Bupati Muaro Jambi 2017- 2022

Sumber Data: KPU Provinsi Jambi

Berdasarkan data di atas, dapat di lihat bahwa ada sepuluh (10) mantan kepala daerah di Provinsi Jambi terdaftar mencalonkan diri dalam pemilihan Anggota Legislatif yaitu di kursi DPR-RI. Dan berikut data besaran jumlah suara yang di peroleh setiap mantan kepala daerah dalam pencalonannya di legislative DPR RI dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 1.2 Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Mantan Kepala Daerah DPR RI Provinsi Jambi Tahun 2024

No.	Nama	Asal Partai	Perolehan Suara
1.	Cek Endra	Golkar	100.112
2.	Safrial	PDI-P	10.453
3.	Hasan Basri Agus	Golkar	87.884
4.	M. Syarif Fasha	Nasdem	72.885
5.	Asafri Jaya Bakri	Golkar	36.820
6.	Ami Taher	PKS	8.035
7.	Masnah Busroh	PAN	19.368
8.	Adirozal	PAN	26.060
9.	Zulfikar Achmad	Demokrat	50.927
10.	Mashuri	PPP	6.497

Sumber: KPU Provinsi Jambi

Berdasarkan data perolehan suara di atas, terdapat empat mantan kepala daerah berhasil meraih kursi di legislatif DPR RI pada pemilihan umum Tahun 2024, diantarnya yaitu, Cek Endra dari partai Golkar dengan perolehan suara sebesar 100.112 suara. Hasan Basri Agus yang merupakan caleg petahanan dari partai Golkar juga berhasil duduk kembali menjadi anggota legislatif dengan perolehan sebesar 87,884 suara. Ketiga ada M.Syarif Fasha dari partai Nasdem dengan perolehan suara sebesar 72,885 suara. Dan Keempat ada Zulfikar Achmad dari partai Demokrat dengan perolehan 50.927 suara. Sisanya mengalami kegagalan dalam pemilihan sehingga tidak berhasil menjadi Anggota Legislatif di Provinsi Jambi.

Dalam pembahasan lebih lanjut mengenai kegagalan beberapa kepala daerah untuk menjadi anggota legislatif tentunya tidak lepas dari keterlibatan partai

politik dimana partai politik adalah suatu wadah untuk para calon-calon anggota legislatif (caleg) untuk mengumpulkan dukungan serta menjadi suatu roda yang membantu calon – calon anggota legislatif untuk mendapatkan jabatan politik.

Partai politik tentunya menjadi latar belakang atas terpilihnya seorang kandidat. Partai Politik akan melihat seberapa diterimanya (akseptabilitas), tingkat keterpilihan (elektabilitas) dan dikenalnya (Popularitas) calon, dan potensi calon. Pencalonan anggota legislatif memiliki porsi yang relatif besar dalam pertimbangan calon pemilih dalam menentukan pilihannya. 14

Setidaknya, atensi publik ini lebih tinggi dibandingkan hanya faktor partai politik yang menaungi caleg tersebut. Posisi dan dukungan partai politik tidak hanya ditentukan dari persepsi dan kesan partai politik dimata pemilih, namun faktor caleg yang dicalonkan di setiap daerah pemilihan memiliki kontribusi yang besar pada posisi partai politik.¹⁵

Dalam menentukan pasangan calon dengan elektabilitas yang menjadi tolak ukur partai dalam menentukan pasangan calon. Berikut Elektabilitas dari Mantan Kepala Daerah:

Tabel 1.3 Elektabilitas Mantan Kepala Daerah Calon Anggota DPR RI 2024 Jambi

No.	Nama	Asal Partai	% Suara
1.	Hasan Basri Agus (HBA)	Golkar	15
2.	M. Syarif Fasha	Nasdem	7,30
3.	Safrial	PDI-P	3.15
4.	Asafri Jaya Bakri	Golkar	4.20
5.	Ami Taher	PKS	4.30
6.	Cek Endra	Golkar	5

¹⁴ Willa Wahyuni, 2023, 'Melek Pemilu 2024: Melihat Pengaruh Parpol Terhadap Kualitas Caleg', Diambil dari hukumonline.com/berita/a/Melihat-pengaruh-parpol-terhadap- kualitas-caleg-It6581fe84863e/, Diakses tanggal 27 Mei 2024, pukul 21:45 WIB.

-

¹⁵ Ibid.

No.	Nama	Asal Partai	% Suara
7.	Masnah Busro	PAN	3.20
8.	Zukfikar Achmad	Demokrat	4,80
9.	Mashuri	PPP	4,10
10.	Adirozal	PAN	4,40

Sumber Data: Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia

Berdasarkan data elektabilitas di atas maka dapat di simpulkan bahwa selain keterlibatan partai politik dalam pemilihan anggota legislatif maka elektabilitas juga sangat mempengaruhi sehingga ketiga mantan kepala daerah berhasil menjadi anggota legislatif karena jika dilihat pada data di atas elektabilitas yang dimiliki keempat mantan kepala daerah yang berhasil menjadi anggota legislatif yaitu elektabilitas yang tinggi sedangkan sisanya relatif rendah hal ini dapat membuktikan bahwa ternyata elektabilitas memberikan pengaruh yang sangat signifikan.

Penelitian terdahulu yang di teliti oleh Heni Anggraini yang berjudul "Analisis Faktor Kegagalan Syarif Fasha Dalam Mendapatkan Dukungan Partai Politik Pada Pemilihan Gubernur Jambi Tahun 2020" menjelaskan bahwa partai politik yang dapat mengusung calon kandidat adalah partai yang memiliki kursi di legislatif sehingga partai politik melihat elektabilitas yang di miliki calon kandidat yang di usung, penelitian ini di teliti menggunakan pendekatan kualitatif yang di teliti menggunakan teori kandidasi dan partai politik yang membedakannya dengan penelitian terbaru yaitu penelitian terdahulu berfokus hanya kepada satu informan sedangkan penelitian terbaru berfokus pada pencalonan 10 mantan kepala

daerah menjadi anggota legislatif dan Peneletian terbaru juga diteliti menggunakan teori kekuatan politik.¹⁶

Penelitian terdahulu yang diteliti oleh Dewi Septiani Sari yang berjudul "Safaruddin Datuk Bandaro Rajo: Dari Kepala Desa Menjadi Anggota DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota 1983-2019" menjelaskan bahwa Safaruddin Datuk Badaro menjadi kepala desa kemudian karir politiknya melonjak setelah Safaruddin Datuk Baduro menjadi anggota DPRD. Penelitian ini diteliti dengan pendekatan deskriptif analisis. Penelitian ini memiliki persamaan yaitu sama-sama meneliti tentang pencalonan mantan kepala daerah menjadi anggota legislatif, namun yang membedakannya adalah pada penelitian terdahulu fokus meneliti kepala desa yang berpindah menjadi anggota legislatif, sedangkan penelitian terbaru berfokus pada pencalonan mantan kepala daerah yang dilakukan dengan menjadi anggota Legislatif DPR RI.¹⁷

Penelitian terdahulu yang di teliti oleh Anggun Putri Dayanti dan Fitriyah "DPRD Tanpa Perempuan: Kegagalan Caleg Perempuan Dalam Pemilihan Legislatif" menjelaskan bahwa kasus kegagalan caleg perempuan pada pemilihan legislatif yang berdampak pada rendahnya keterlibatan perempuan. Penelitian ini di teliti menggunakan teori partisipasi politik, faktor kegagalan modalitas dan sosial budaya adapun perbedaan dari penelitian terbaru dan terdahulu yaitu pada

16 т

Heni Anggraini, 'Analisis Faktor Kegagalan Syarif Fasha Dalam Mendapatkan Dukungan Partai Politik Pada Pemilihan Gubernur Jambi Tahun 2020'. Skripsi. Universitas Jambi, 2023.

¹⁷ Dewi Septina Sari, 'Safaruddin Datuk Bandaro Raja: Dari Kepala Desa Sampai Menjadi Anggota DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota 1983-2019'. Skripsi. Universitas Andalas, 2022.

penelitian terdahulu berfokus pada caleg perempuan sedangkan penelitian terbaru berfokus kepada pencalonan mantan kepala daerah menjadi anggota legislatif.¹⁸

Penelitian mengenai fenomena pencalonan mantan kepala dearah menjadi anggota legislatif, yang dalam hal ini adalah DPR RI belum banyak diteliti, maka dari itu peneliti tertarik melakukan penelitian terhadap fenomena tersebut. Berdasarkan Uraian diatas maka peneliti tertarik meneliti dengan judul "Analisis Pencalonan Mantan Kepala Daerah Dalam Pemilihan Anggota Legislatif DPR-RI di Provinsi Jambi Tahun 2024".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas penulis merumuskan suatu pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bagaimana kekuatan politik yang dimiliki oleh mantan kepala daerah dalam upaya memenangkan pencalonan sebagai anggota legislatif DPR-RI di Provinsi Jambi Tahun 2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini di terapkan untuk target yang di inginkan tercapai, agar penelitian ini dapat bermanfaat. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

Untuk mengetahui dan mempelajari tentang kekuatan politik yang dilakukan oleh mantan kepala daerah dalam upaya memenangkan pencalonan sebagai anggota legislatif DPR-RI di Provinsi Jambi Tahun 2024.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan agar nanti nya di harapkan dapat memberi umpan balik atau manfaat kepada berbagai pihak. Penelitian ini bermanfaat untuk:

¹⁸ Anggun Putri Dayanti, 'DPRD Tanpa Perempuan: Kegagalan Caleg Perempuan Dalam Pemilihan Legislatif', *Jurnal*, 2019.

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini di harapkan bisa digunakan menjadi sumber pengetahuan, dan menganalisis tentang fenomena pencalonan mantan kepala daerah menjadi anggota legislatif DPR RI Di Provinsi Jambi 2024.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis diharapkan mampu menjadi acuan dalam menyajikan masukan dan informasi mengenai pencalonanan mantan kepala daerah menjadi anggota legislatif DPR RI Di Provinsi Jambi 2024. Hal ini dapat dijadikan sebagai saran untuk penelitian selanjutnya dan dapat direkomendasikan kepada pihak yang membutuhkan.

1.5 Landasan Teori

1.5.1 Kekuatan Politik

Teori kekuatan politik ini mendukung pembahasan dalam penelitian ini, khususnya dalam konteks sumber kekuatan politik yang berperan dalam pencalonan mantan kepala daerah. Pembahasan ini menguraikan berbagai sumber kekuatan yang dapat digunakan untuk meraih kemenangan dalam pemilu, mulai dari strategi menduduki hingga menerapkan kekuasaan dalam struktur kemasyarakatan. Pemahaman ini menjadi penting dalam analisis pencalonan mantan kepala daerah, terutama dalam melihat bagaimana kekuatan politik tersebut berkontribusi dalam Pemilihan Anggota Legislatif DPR-RI di Provinsi Jambi Tahun 2024.

Kekuatan politik merupakan gerakan yang dilakukan oleh suatu golongan dalam mencapai atau mempertahankan tujuannya, gerakan tersebut dapat berupa gerakan konservatif maupun gerakan progresif dengan menerapkan nilai-nilai

leberalisme. Pada dasarnya banyak aspek potensial trasnformasikan menjadi kekuatan politik sebagaimana yang dikatakan oleh Bachtiar Effendi yakni:

"Kekuatan politik bersifat fotmal atau non formal. Kekuatankekuatan atau kelompok-kelompok yang sejenis dengan itu, kekuatan-kekuatan politik yang formal mengambil bentuk kedalam partai-partai politik. sementara yang dikatakan kekuatan politik non formal adalah merupakan bagian dari bangunan civil society." ¹⁹

Menurut Bachtiar Effendi diera reformasi ada beberapa kekuatan politik diantara nya sebagai berikut:

1. Popularitas

Popularitas sangat berperan dalam menentukan minat dan pilihan masyarakat. Namun disisi lain, popularitas yang hanya dilandasi integritas semu, tak akan mencapai hasil maksimal ditengah masyarakat yang kian cerdas. Terbukti akhirakhir ini indikator tersebut kian tampak, terutama dalam pemilihan-pemilihan kepala daerah diberbagai pelosok tanah air akhir-akhir ini.

2. Jabatan

Politisasi birokrasi banyak kita lihat dalam pertarungan politik di Indonesia, itu sudah menjadi rahasia umum bagi para politisi yang bertarung dalam perebutan sebuah kekuasaan. Masalah politisasi birokrasi menjadi persoalan hampir diseluruh daerah di Indonesia. Birokrasi sering kali terlibat dalam politik praktis pada pelaksanaan pemilihan umum. Keterlibatan birokrasi dalam politik praktis ini dilakukan dengan menjadi anggota tim sukses salah satu calon dan memobilisasi bawahan dan massa di sekitarnya untuk mendukung calon tersebut.

-

¹⁹ P. Anthonius Sitepu, 'Tranformasi Kekuatan-Kekuatan Politik Suatu Studi Teori Kelompok Dalam Konfigurasi Politik Sistem Politik Indonesia', *Jurnal Pemberdayaan Komunitas*, 2004, Vol. 3, hlm. 164.

3. Masa yang terorganisir

Organisasi masa dapat digunakan sebagai sarana penyuksesan Pilkada apabila dilakukan rekruitmen massa dengan baik, terorganisir, memiliki program yang memberikan solusi kepada masyarakat, sosialisasi, serta mendidik masyarakat.

4. Normatif (Pemimpin agama dan kepala suku)

Dalam perayaan demokrasi tokoh agama mempunyai peran yang sangat penting dalam rangka menggerakan partisipasi politik masyarakat dalam sebuah pemilukada. Keberhasilan tokoh agama dalam rangka menggerakan partisipasi politik masyarakat dalam pilkada sangat ditentukan oleh kemampuan atau gaya dari tokoh agama dalam memberikan nasehat terhdap pelaksanaan pilkada, himbauan dan sarannya dalam mempengaruhi warga masyarakat atau juga sangat ditentukan oleh cara tokoh agama dalam menggunakan kewenangan sebagai pemimpin agama.

5. Kekayaan/Ekonomi

Kekuatan kapital telah mendominasi sistem politik Indonesia pasca krisis. Oligarkhi ekonomi mampu merubah peta dukungan suara, membalikkan momentum politik hingga membeli hasil politik yang diinginkan dengan mengeksploitasi sumber daya ekonomi yang dimilikinya. Kekuatan kapital yang membesar cepat ini menjadi kekuatan politik yang signifikan.

6. Informasi/Media sosial

Media sosial menjadi sumber informasi paling cepat saat ini dan menjadi sarana terbaik dalam meningkatkan popularitas. penetrasi internet di Indonesia saat ini telah menjangkau 196,7 juta penduduk berdasarkan survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). Kondisi ini membuat partai-partai politik berlomba- lomba menceburkan diri membangun kekuatan baru di ranah

digital. Pemanfaatan platform media sosial untuk kepentingan politik telah dirasakan manfaatnya oleh Hillary Brigitta Lasut. Anggota DPR RI termuda ini memakai berbagai platform media sosial sebagai wadah berkampanye dalam Pemilihan Legislatif 2019. Ia sendiri saat itu mampu meraup 70.345 suara untuk mengantarkannya ke Senayan.

"Saya merasakan bahwa pengaruh media sosial ketika berkampanye sangat memiliki pengaruh untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat. Melalui media sosial pula saya bisa berinteraksi secara cepat dengan masyarakat, termasuk para konstituen saya".

Hannah arendt kekuatan merupakan sifat dan karakter yang dimiliki setiap individu. Pada hakikatnya kekuatan berdiri sendiri, namun keberadaan kekuatan dapat dilihat dari relasi antara individu terkait dengan orang lain. Karena itu, kekuatan dapat dipengaharui. Pengaruh yang masuk terkadang tampak seperti memperkuat individu yang bersangkutan, namun sesungguny memiliki potensi melakukan perusakan terhadap kekuatan.²⁰

Dalam kehidupan masyarakat, kita mengenal sejumlah kelompok yang paling mampu melakukan proses tawar menawar, mengerahkan sumber-sumber kekuasaan secara maksimal dengan memilih saluran yang tepat untuk menyalurkan aspirasi mereka. kelompok inilah yang kita kenal sebagai kelompok yang memiliki kekuatan politik. Pemahaman dari sejumlah kelompok tersebut, termasuk di dalamnya potret perjalanan dan peran mereka dalam kehidupan pemerintahan Indonesia, terangkum dalam buku Kekuatan-Kekuatan Politik ini. Terdapat 11 elemen Kekuatan Politik yang diulas di dalam buku ini, diantaranya adalah Militer, LSM, Partai Politik, Organisasi Buruh, Golongan Intelektual, Pers dan Media

_

²⁰ Maurizio Passerin D''enteves, *The Political Philosophy of Hannan Arendt*, (Yogyakarta: Cetakan Pertama, 2003). hlm. 19.

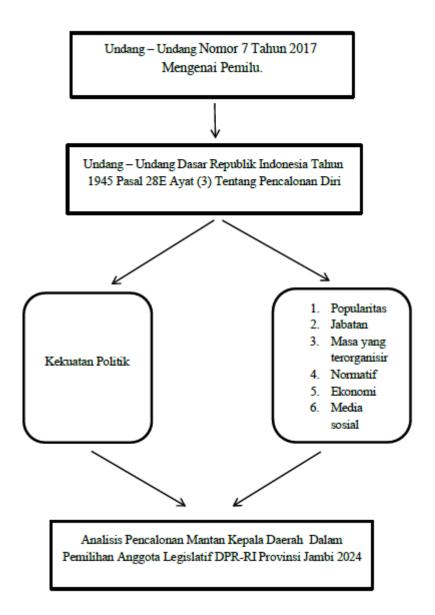
Massa, Mahasiswa, Agama, Pengusaha, Lembaga Survei dan birokrasi. Posisi dan peran/fungsi tiap-tiap kekuatan politik tersebut dapat dilihat dalam suatu sistem politik dan bagaimana mereka mencoba mempengaruhi proses pembuatan keputusan politik.

Dilema yang paling berat bagi intelektual adalah dilema mengenai hubungan intelektual dengan kekuasaan Sedangkan media massa sebagai bagian dari kekuatan politik merupakan kekuatan keempat di dunia. Sejumlah fungsi yang dilakukan pers menyebabkan pers memiliki kemampuan daya tawar dengan kekuatan-kekuatan lain, tak terkecuali pemerintah.²¹

1.6 Kerangka Pikir

Gambar 1.1 Kerangka Berpikir

²¹ Haniah Hanafie and Ana Sabhana Azmy, 'Kekuatan-Kekuatan Politik', Diambil dari https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/42503, Diakses tanggal 15 October 2023.



Untuk memudahkan penulis dalam merancang dan menjelaskan maksud dan tujuan penelitian ini, di perlukan suatu panduan berupa kerangka pikir yang dapat di gunakan sebagai pedoman dalam menguraikan permasalahan yang sedang di teliti, seperti kerangka pikir yang telah di tampilkan di atas.

Pada penelitian ini di rujuk dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Mengenai Pemilu sebelumnya kemudian di ikuti dengan payung hukum dari Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28E Tentang Pencalonan Diri.²² Hal ini diikuti dengan isu pencalonan mantan kepala daerah menjadi anggota legislatif dan di uji dengan Teori Kekuatan Kepemimpinan yang kemudian di puncak penelitian yaitu Analisis Pencalonan Mantan Kepala Daerah Dalam Pemilihan Anggota DPR-RI di Provinsi Jambi Tahun 2024.

1.7 Metode Penelitian

Metode Penelitian hakekatnya merupakan metode ilmiah dalam mengumpulkan informasi untuk tujuan tertentu. Metode ilmiah, data, tujuan dan kegunaan adalah empat istilah kunci yang perlu di ingat sehubungan dengan hal ini. Kegiatan penelitian didasarkan pada sifat-sifat ilmiah yaitu empiris, rasional serta sistematis. Istilah rasional mengacu pada cara penelitian dilakukan sehingga dapat dipahami melalui penalaran manusia. Empiris mengacu pada metode yang dapat dirasakan oleh indera manusia dan dapat melihat serta memahami cara yang digunakan. Sedangkan sistematis mengacu bahwa langkah-langkah logis tetantu digunakan dalam proses penelitian.²³

1.7.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Menurut Sugiyono, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek alamiah, dimana peneliti menjadi instrumen kunci pada penelitian ini, analisi infomasi bersifat kualitatif, serta hasil penelitian kualitatif lebih menekankan arti dari pada generalisasi.

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan RnD*, 2nd edn (Bandung: Alfabeta, 2019). hlm. 2.

²² Hukum Online, 'Bunyi Dan Unsur Pasal 28E Ayat 3 UUD 1945', https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-dan-unsur-pasal-28e-ayat-3-uud-1945-%0Alt65e6f4632e37f/%0A, Diakses tanggal 13 Juni 2024, pukul 01:25 WIB.

Terdapat sejumlah alasan dalam penggunaan penelitian kualitatif. *Pertama*, peneliti hendak memahami fenomena yang berkaitan dengan subjek penelitian. *Kedua*, peneliti melihat sampai sekarang bahwa masih sedikit yang mengetahui fenomena ini. *Ketiga*, peneliti bermaksud untuk meneliti fenomena ini secara mendalam. *Keempat*, peneliti yang bertindak sebagai pengumpul informasi utama.

Kajian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Metode kualitatif deskriptif adalah strategi penelitian yang mana di dalamnya para peneliti dengan cermat mengeksplorasi sebuah program, kesempatan, tindakan, proses atau sekelompok individu. Kasus tersebut ditentukan oleh aktivitas serta waktu, sehingga peneliti menggunakan berbagai metode untuk menggunakan data lengkap berdasarkan kerangka waktu yang telah ditentukan. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, analisis data yang diperoleh berupa penggambaran atau pemaparan mengenai kondisi atau situasi yang sedang diteliti dalam bentuk narasi.

Alasan peneliti menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dalam penelitian ini sebagai upaya peneliti untuk mempermudah dalam melihat peristiwa yang sedang terjadi.

1.7.2 Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian yaitu tempat dimana penulis bisa mengumpulkan data akurat untuk menggambarkan objek yang akan diteliti. Kajian ini dilaksanakan di wilayah Provinsi Jambi yang dilaksanakan kepada parpol pengusung calon Anggota Legislatif DPR RI. Pertimbangan penulis melaksanakan penelitian di lokasi ini guna mendapatkan data serta informasi yang diperlukan untuk penelitian yang sedang dilakukan.

1.7.3 Fokus Penelitian

Fokus dari penelitian ini yaitu memberikan batasan pada penelitian untuk memilih data mana yang tidak relevan dan data yang relevan. ²⁴ Bersumber dari latar belakang yang diterapkan, sehingga fokus kajian ini yaitu menganalisis pencalonan Mantan Kepala daerah dalam pemilihan anggota legislatif di Provinsi Jambi Tahun $2024.^{25}$

1.7.4 Sumber Data

Dalam Mengumpulkan sumber data, terdapat dua sumber data yang digunakan peneliti berupa data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data Primer merupakan informasi yang didapat secara langsung dari lokasi penelitian ataupun objek penelitian. Data primer merupakan semua data penelitian yang didapat dari lapangan atau data yang diperlukan untuk penelitian dan diperoleh langsung dari sumber atau lokasi objek yang bersangkutan. ²⁶ Data Primer dalam kajian ini yaitu data yang berasal dari hasil interview secara langsung.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah bahan pendukung penelitian dalam memudahkan penelitian. Data sekunder bersumber dari buku-buku jurnal dan skripsi dan penelitian-penelitian terdahulu yang telah di publikasikan. Pada penelitian ini data sekunder yang digunakan yaitu teori dari buku, jurnal/skripsi, dan data pendukung lainnya.²⁷

²⁷ Ibid.

²⁴ Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, dan Penelitian Gabungan*, 4th edn (Jakarta: PT. Fajar Mandiri, 2017). hlm. 366.

²⁵ Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, dan Penelitian Gabungan*, 4th edn (Jakarta: PT. Fajar Mandiri, 2017). hlm. 366.

²⁶ Ibid.

1.7.5 Teknik Penentuan Informan

Dalam penelitian ini teknik penentuan informan menggunakan teknik *Purposive Sampling* atau memilih individu dan tempat yang diteliti karena dalam teknik ini menggambarkan secara spesifik pemahaman tentang persamaan riset dan fenomena.²⁸

Tabel 1.4 Daftar Informan Penelitian

No	Informan	Jabatan
1.	Syarif Fasha	Sebagai calon kandidat utama di DPR
		RI
2.	Ados Sianturi	Tim Pemenangan dari partai Demokrat
3.	Muhammad Fikri	Tim Pemenangan dari Partai PPP
4.	Asafri Jaya Bakri	Sebagai calon kandidiat utama di DPR
		RI

Sumber Data: Olahan Penulis

1.7.6 Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data, data dapat dikumpulkan dengan bermacam metode, namun metode yang digunkan sebagai berikut:

a. Wawancara Mendalam (*In-dept Interview*)

Wawancara merupakan salah satu cara agar data penelitian dapat dikumpulkan. Wawancara mampu didefinisikan sebagai suatu kegiatan sederhana ataupun proses berkomunikasi antara pewawancara dan yang diwawancarai secara langsung, juga dikenal sebagai informan. Wawancara juga

²⁸ Ibid.

dapat didefinisikan sebagai percakapan tatap muka anatara pewawancara dengan informan dimana penanya menanyakan secara langsung mengenai informasi yang sedang dipelajarai dan yang telah dirancang sebelumnya.

b. Observasi

Salah satu cara untuk mengamati secara langsung perilaku informan dilapangan adalah observasi. Beberapa hal yang didaptkan dari hasil observasi antara lain yaitu objek, ruang (tempat), aktivis, peristiwa atau kejadian, tindakan, perasaan dan waktu. Tujuan peneliti melakukan observasi yaitu memperkenalkan gambaran logis tentang perilaku, untuk menanggapi pertanyaan, untuk memhami cara berperilaku manusia, dan untuk penilaian secara khusus memperkirakan perspektif tertentu.²⁹

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan tertulis atau hasil karya orang lain tentang peristiwa masa lalu. Jenis dokumen dapat berupa gambar, teks bahkan foto. Dalam kajian ini dokumentasi dapat berupa kegiatan pengumpulam data ataupun informasi serta foto lapangan.

1.7.7 Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, merupakan pembahasan yang menilai subjek penelitian berdasarkan karakteristik tertentu dan dijelaskan dengan deskripsi bukan angkaangka untuk menerangkan analisis data yang didepatkan. Selanjutnya data tersebut diolah menggunakan cara sebagai berikut.³⁰

a. Reduksi Data

²⁹ Ibid.

³⁰ Ibid.

Mereduksi data merupakan cara menentukan tema dan pola, meringkas, memilih aspek yang paling penting dari penelitian. Sedikit data yang diberikan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas serta memudahkan peneliti untuk mengumpulkan data selanjutnya serta mencari data saat diperlukan.

b. Penyajian Data (Display Data)

Pada tahapan ini yang ditampilkan dalam wujud narasi, dimana peneliti menyajikan temuan dalam wujud kalimat. Tujuan penyajian data adalah untuk mempermudah dalam membaca dan menarik kesimpulan.³¹

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah cara agar dapat memberikan jawaban atas rumusan masalah yang sudah ditentukan diawal serta sebagai sebuah kesimpulan dari penelitian. Pada tahapan ini, kesimpulan awal yang dibuat masih bersifat sementara dan dapat berubah ketika tidak memiliki bukti kuat yang cukup untuk mendukung pada tahap pengumpulan data selanjutnya.

1.7.8 Keabsahan Data (Triangulasi)

Triangulasi dimaknai sebagai pemeriksaan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu dalam teknik pengumpulan data. Dengan demikian dua teknik triangulasi yaitu, teknik teknik triangulasi dengan sumber dan triangulasi dengan teknik digunakan dalam penelitian.

a. Triangulasi dengan sumber

Sebuah teknik yang dikenal sebagai triangulasi sumber adalah metode untuk memverifikasi data yang diperoleh dari berbagai sumber untuk menentukan kredibilitasnya.³²

_

³¹ Ibid.

³² Ibid.

b. Triangulasi dengan teknik

Triangulasi yang menelaah data dengan metode yang berbeda dan dari sumber yang sama untuk menguji keabsahan data.